PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PELAJAR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Liveny Chindye Hana

NPP. 33.0717

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: fenyhana76@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si

Email: andiazikin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study focuses on the decline of national insight (wawasan kebangsaan) among senior high school students in South Central Timor (TTS) Regency, marked by 24% of young people who cannot recite Pancasila values, 53% who do not know the national anthem, and 61% who show indifference to the nation's condition, while only 20 out of 92 SMA/SMK/MA schools participated in activities organized by the National Unity and Politics Agency (Bakesbangpol). Previous studies on Bakesbangpol's role were conducted in urban contexts and have not specifically examined regions with distinctive local cultures such as TTS.* **Purpose:** *This study aims to analyze the role of Bakesbangpol in fostering national insight for students in TTS Regency.* **Method:** *This study used a descriptive qualitative approach with an inductive method. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with 9 informants consisting of the Head of Bakesbangpol (I1), Head of National Insight Division (I2), staff (I3), school principals (I4), PKn teachers (I5, I6), and students (I7, I8, I9), as well as observation and documentation. Data validity was tested through source and technique triangulation. Data were analyzed using Miles and Huberman's three-stage model: data reduction, data display, and conclusion drawing. The study was conducted at Bakesbangpol TTS from January to April 2026.* **Result:** *Bakesbangpol has implemented its role through three main programs: (1) socialization of the Four National Pillars during the School Introduction Period (MPLS) routinely since 2022; (2) the Four National Pillars Competition integrating local TTS culture—tenun ikat and traditional dances—which proved highly effective but was suspended since 2022 due to budget constraints; and (3) Paskibraka training and selection, which had a significant impact on character formation. Of 92 schools, only 20 participated. The main inhibiting factors were budget limitations, insufficient human resources, and low participation from schools in remote areas.* **Conclusion:** *Bakesbangpol TTS's role in fostering national insight for students has been implemented but not yet optimal. It is recommended to establish written SOPs, revitalize the Four Pillars Competition, expand the use of social media, and increase budget allocations to reach remote schools.*

Keywords: Bakesbangpol; local culture; national insight; role; students.

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini berfokus pada menurunnya wawasan kebangsaan di kalangan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang ditandai oleh 24% generasi muda tidak hafal nilai Pancasila, 53% tidak mengenal lagu Indonesia Raya, dan 61% bersikap tidak peduli terhadap kondisi bangsa (Vikri & Djohan, 2025), sementara hanya 20 dari 92 sekolah SMA/SMK/MA yang berpartisipasi dalam kegiatan Bakesbangpol. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang peran Bakesbangpol dilakukan di konteks perkotaan dan belum secara spesifik mengkaji daerah dengan kekayaan budaya lokal khas seperti TTS. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol dalam pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 9 informan, serta observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis menggunakan model tiga tahap Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Bakesbangpol TTS pada Januari hingga April 2026. **Hasil/Temuan:** Bakesbangpol telah melaksanakan perannya melalui tiga program utama: (1) sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara rutin sejak 2022; (2) Lomba Empat Pilar Kebangsaan berbasis budaya lokal TTS yang sangat efektif namun terhenti sejak 2022 karena keterbatasan anggaran; dan (3) pembinaan dan seleksi Paskibraka yang berdampak signifikan dalam pembentukan karakter. Dari 92 sekolah, baru 20 yang berpartisipasi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, kekurangan SDM aparatur, dan rendahnya partisipasi sekolah di wilayah terpencil. **Kesimpulan:** Peran Bakesbangpol TTS dalam pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar telah berjalan namun belum optimal. Disarankan agar Bakesbangpol menyusun SOP tertulis, merevitalisasi Lomba Empat Pilar, mengoptimalkan media sosial, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk menjangkau sekolah terpencil.

Kata kunci: Bakesbangpol; budaya lokal; pelajar; peran; wawasan kebangsaan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai fundamental yang menjadi identitas nasional. Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan berfungsi sebagai fondasi ideologis yang menopang persatuan dan kesatuan NKRI di tengah keragaman sosial, budaya, dan agama (Rumengan et al., 2022). Oleh karena itu, pembinaan wawasan kebangsaan bukan hanya sekadar kewajiban edukatif, tetapi merupakan imperatif strategis untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan bangsa (Maksudi, 2023).

Pelajar sebagai generasi muda menempati posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan NKRI. Fahrurrozhi et al. (2021) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran signifikan dalam proses internalisasi nilai Pancasila sehingga peserta didik tidak hanya memahami aspek kognitif tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatan bangsa juga berasal dari warisan budaya lokal yang beraneka ragam. Koentjaningrat (2009) mengemukakan bahwa budaya merupakan sistem nilai dan simbol yang menjadi identitas suatu masyarakat; ketika budaya lokal terpinggirkan, maka jati diri bangsa turut melemah. Tilaar (2002) menyebutkan

bahwa globalisasi membawa perubahan nilai yang cepat dan sering kali tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Salah satu isu penting saat ini adalah mulai berkurangnya wawasan kebangsaan di kalangan pelajar. Arkan dan Ulfatun Najicha (2025) menjelaskan bahwa di era globalisasi, rasa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia mengalami penurunan karena derasnya arus teknologi dan budaya asing yang masuk tanpa filter. Data empiris menunjukkan tingkat kritis dari krisis kebangsaan ini: sekitar 24% generasi muda tidak hafal nilai-nilai Pancasila, 53% tidak mengenali lagu Indonesia Raya, dan 61% menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kondisi bangsa (Vikri & Djohan, 2025). Sementara itu, dari 33 responden dalam penelitian Dewi et al. (2024), sebanyak 60,6% lebih tertarik pada budaya asing dibandingkan budaya lokal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan institusi yang secara khusus bertanggung jawab membina wawasan kebangsaan di tingkat daerah. Sesuai Peraturan Bupati TTS Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 11 huruf c, Bakesbangpol bertugas melaksanakan kegiatan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan. Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan, dari total 92 sekolah pada jenjang SMA, SMK, dan MA, hanya 20 sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol, mengindikasikan bahwa pembinaan wawasan kebangsaan belum menjangkau sebagian besar pelajar.

Tabel 1.
Partisipasi Sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Jenjang	Negeri	Swasta	Jumlah	Mengikuti	Tidak Mengikuti
1.	SMA	40	17	56	12	44
2.	SMK	19	16	35	7	28
3.	MA	1	-	1	1	-
Total		60	33	92	20	72

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Timor Tengah Selatan dan diolah oleh peneliti, 2025

Kondisi ini diperparah oleh kuatnya pengaruh modernisasi dan budaya asing. Menurut Natty (2024), masyarakat Timor Tengah Selatan pun tidak terlepas dari ancaman akulturasi budaya asing yang semakin mengikis kecintaan terhadap budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menegaskan urgensi peran Bakesbangpol yang tidak hanya mencakup aspek ideologis-formal, tetapi juga perlu mengintegrasikan dimensi pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas kebangsaan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada belum optimalnya peran Bakesbangpol dalam menjangkau pelajar di Kabupaten TTS, khususnya di sekolah-sekolah wilayah terpencil. Penelitian terdahulu menunjukkan tiga kesenjangan. Pertama, mayoritas penelitian dilakukan di konteks perkotaan (Yogyakarta, Jakarta Utara, Cimahi) dan belum menyentuh dinamika pembinaan wawasan kebangsaan di daerah dengan kekayaan budaya lokal yang khas seperti TTS. Kedua, penelitian sebelumnya belum secara spesifik menganalisis integrasi antara pembinaan wawasan kebangsaan dengan pelestarian budaya lokal. Ketiga, fokus penelitian terdahulu cenderung pada generasi muda secara umum, sementara pelajar SMA sebagai generasi yang sedang dalam proses pembentukan identitas masih memerlukan analisis mendalam tentang peran Bakesbangpol.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai peran Bakesbangpol TTS dalam pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif dan kontekstual. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami hambatan partisipasi pelajar, sehingga program pembinaan berisiko tidak tepat sasaran. Tanpa intervensi yang tepat, nilai-nilai budaya lokal TTS yang kaya dapat semakin terpinggirkan di kalangan generasi muda, melemahkan ketahanan ideologis daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu beserta perbedaan dengan penelitian ini.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Utama	Perbedaan
1	Hartanti & Sunarso (2024)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Kota Yogyakarta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kualitatif deskriptif	Kesbangpol Yogyakarta menjalankan sosialisasi, seminar, dan silaturahim; masih menghadapi rendahnya partisipasi tatap muka.	Dilakukan di konteks perkotaan, belum mengintegrasikan dimensi budaya lokal.
2	Idrus & Lukito (2024)	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda di Sungai Bambu	Kualitatif deskriptif	Bakesbangpol Jakarta Utara telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun perlu peningkatan transparansi.	Belum menganalisis integrasi budaya lokal dalam pembinaan.
3	Nurfatimah & Dewi (2021)	Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan di Kehidupan Bangsa Indonesia	Kualitatif deskriptif	Penghayatan nilai Pancasila sangat penting untuk memperkuat wawasan kebangsaan menghadapi globalisasi.	Bersifat umum; tidak mendalami peran institusi pemerintah daerah.
4	Putra (2023)	Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Internalisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa di Kota Cimahi	Kualitatif deskriptif	Pembinaan telah berdampak pada sebagian generasi muda di Cimahi, namun dimensi regulator belum optimal.	Dilakukan di perkotaan; belum mengkaji hambatan geografis dan budaya lokal.
5	Vikri & Djohan (2025)	Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam	Kualitatif deskriptif	Bakesbangpol Jambi berperan aktif meningkatkan	Berfokus di wilayah perkotaan; belum mengintegrasikan nilai

	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda di Kota Jambi	wawasan kebangsaan, namun jangkauan ke generasi muda masih perlu diperluas.	budaya lokal daerah dan analisis hambatan geografis.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam empat aspek utama. Pertama, dari segi objek dan lokus penelitian, penelitian ini secara spesifik mengkaji pelajar SMA sederajat di Kabupaten Timor Tengah Selatan—daerah dengan kekayaan budaya lokal suku Dawan (Atoin Meto) yang belum pernah dikaji sebelumnya dalam konteks pembinaan wawasan kebangsaan. Kedua, dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori peran Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014) yang mencakup empat dimensi: harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), evaluasi (evaluation) dan sanksi (sanction)—pendekatan yang belum digunakan penelitian sebelumnya dalam mengkaji peran Bakesbangpol. Ketiga, dari segi metode, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan sembilan informan yang mencakup tidak hanya aparatur pemerintah dan guru, tetapi juga pelajar yang sama sekali belum pernah terjangkau program. Keempat, dari segi temuan, penelitian ini mengungkap secara khusus efektivitas integrasi kearifan budaya lokal TTS—tenun ikat dan tradisi adat Dawan—sebagai medium pembinaan wawasan kebangsaan yang belum pernah dikaji sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena peran Bakesbangpol dalam pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, yang bersifat kontekstual, multidimensional, dan tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui data numerik (Moleong, 2021; Simangunsong, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam menentukan informan (Sugiyono, 2022). Informan terdiri dari 9 orang: Kepala Bakesbangpol Kabupaten TTS (I1) sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan tertinggi dalam kebijakan pembinaan; Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol (I2) sebagai pelaksana teknis utama; staf Bidang Wawasan Kebangsaan (I3) sebagai pelaksana lapangan; Kepala SMAN 1 SoE (I4) sebagai mitra pelaksana; Guru PKn SMAN 1 SoE (I5) dan Guru PKn SMKN 2 SoE (I6) sebagai pendamping kegiatan di sekolah; Pelajar SMAN 1 SoE (I7), Pelajar SMKN 2 SoE yang merupakan mantan Paskibraka (I8), dan Pelajar SMAN 1 Kecamatan Mollo Utara yang belum pernah terjangkau program (I9) sebagai penerima manfaat dan kelompok yang belum terjangkau.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber—membandingkan informasi dari pejabat Bakesbangpol, guru, dan pelajar—serta triangulasi teknik—membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2014). Analisis

data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Saleh (2017) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak Januari 2026 dengan pengumpulan data lapangan pada Januari hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Bakesbangpol menggunakan teori peran Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014) yang mencakup empat dimensi: expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), serta evaluation dan sanction (evaluasi dan sanksi).

3.1. Expectation (Harapan)

Dimensi harapan mencakup ekspektasi dari berbagai pihak terhadap peran Bakesbangpol. Berdasarkan hasil penelitian, harapan telah terdefinisi secara jelas. Kepala Bakesbangpol (I1) menegaskan:

"Kita sadari bahwa perkembangan dunia ini sekarang terlalu cepat, globalisasi ini berdampak terhadap banyak hal, termasuk bagaimana tatanan dan nilai Pancasila itu betul-betul harus dipertahankan. Peran Kesbangpol adalah bagaimana memberikan penguatan dan sosialisasi terkait pentingnya nilai-nilai Pancasila."

Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan (I2) menambahkan bahwa program yang dikaitkan dengan budaya lokal TTS merupakan yang paling terasa dampaknya. Dari perspektif sekolah, Kepala SMAN 1 SoE (I4) berharap Bakesbangpol menjadi mitra tetap dengan program terstruktur setiap semester. Pelajar (I7) mengharapkan program yang lebih sering dan memanfaatkan media sosial, sementara I9 dari SMAN 1 Kecamatan Mollo Utara bahkan tidak mengetahui keberadaan Bakesbangpol sebelum diwawancarai, mengindikasikan adanya gap komunikasi yang serius. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa meskipun arah peran Bakesbangpol sudah diakui semua pihak, terdapat kesenjangan nyata antara harapan ideal dengan kapasitas pelaksanaan aktual, terutama dari segi frekuensi dan jangkauan kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ndraha (2003) yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintahan daerah berfungsi sebagai agen pengendali sosial yang bertugas menumbuhkan stabilitas dan kesadaran nasional.

3.2. Norm (Norma)

Dimensi norma mencakup kepatuhan Bakesbangpol terhadap regulasi dan konsistensi pelaksanaan program. I1 menegaskan bahwa program dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati TTS Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 11 huruf c dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2012, dengan prinsip bahwa setiap kegiatan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kepatuhan normatif ini diwujudkan secara konkret melalui mekanisme surat-menyurat resmi lintas sektor, integrasi komponen penilaian wawasan kebangsaan dalam seleksi Paskibraka, serta adaptasi materi baku ke dalam isu kekinian seperti anti-bullying dan bahaya hoaks. I3 membenarkan bahwa ketegasan pimpinan dalam menolak kegiatan yang belum memenuhi prosedur formal mencerminkan budaya kepatuhan kelembagaan yang kuat.

Meskipun demikian, terdapat dua kelemahan normatif. Pertama, SOP tertulis secara formal belum tersusun meskipun alur kerja sudah dipahami tim—I2 mengakui hal ini perlu segera dibakukan. Kedua, konsistensi pelaksanaan belum merata: I4 membenarkan bahwa sekolah di kecamatan Kie dan Nunkolo belum pernah mendapat kunjungan dalam tiga tahun terakhir.

3.3. Performance (Wujud Perilaku)

Wujud perilaku Bakesbangpol diwujudkan melalui tiga program utama.

Pertama, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan pada MPLS. Program ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru secara rutin sejak 2022. I1 menyatakan bahwa SMKN 1 dan SMKN 2 secara rutin mengundang Bakesbangpol setiap ajaran baru—suatu indikator positif bahwa sekolah telah merasakan manfaat program ini. I3 mengungkapkan praktik kustomisasi materi: untuk SMK kejuruan teknik dikaitkan dengan etos kerja dan bela negara profesional, sedangkan untuk SMA IPS lebih banyak ke aspek politik dan ketatanegaraan. I7 mengungkapkan bahwa sosialisasi Bakesbangpol berbeda dari pelajaran PKn biasa karena menggunakan contoh nyata dari kehidupan di TTS.

Kedua, Lomba Empat Pilar Kebangsaan Berbasis Budaya Lokal. I1 menjelaskan bahwa lomba ini memadukan pidato wawasan kebangsaan dengan pentas seni budaya menggunakan pakaian adat, tenun ikat, dan tarian kreasi modern. I2 menegaskan filosofinya: agar pelajar sadar bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada dalam budaya lokal—gotong royong adalah sila kelima, musyawarah adat adalah sila keempat. I6 mengungkapkan dampak ganda yang tidak terduga: pelajar secara aktif menggali makna motif tenun adat kepada orang tua mereka. I7 mengalami transformasi pemahaman: *"Saya baru benar-benar sadar bahwa budaya daerah saya itu punya nilai kebangsaan yang tinggi. Ternyata Pancasila itu ada di dalam kain tenun ikat nenek moyang saya juga."* Namun program ini terhenti sejak 2022 karena kebijakan efisiensi anggaran.

Ketiga, Pembinaan dan Seleksi Paskibraka. I2 menyatakan bahwa pemahaman wawasan kebangsaan merupakan penentu kelulusan seleksi, karena Paskibraka bukan hanya soal fisik dan baris-berbaris tetapi soal karakter bangsa. I8 yang merupakan mantan Paskibraka mengungkapkan: *"Proses menjadi Paskibraka itu berat tapi membentuk karakter... Setelah pengalaman itu, pandangan saya terhadap Indonesia berubah total."* Dari 92 sekolah, baru 20 yang terlibat dalam ketiga program tersebut.

3.4. Evaluation dan Sanction (Evaluasi dan Sanksi)

Bakesbangpol telah melakukan evaluasi pasca kegiatan secara informal. I2 menyatakan bahwa dari evaluasi tersebut Bakesbangpol menyadari metode ceramah satu arah kurang efektif, sehingga beralih ke tanya jawab, kuis, dan diskusi kelompok. Namun I5 mengidentifikasi kelemahan mendasar: evaluasi masih sebatas obrolan tanpa instrumen terstruktur seperti kuesioner kepuasan atau pre-test/post-test. I6 menambahkan bahwa catatan observasi guru tidak pernah tersampaikan secara formal ke Bakesbangpol karena tidak ada saluran evaluasi yang disediakan. Dalam konteks sanksi, keterbatasan anggaran yang memaksa penundaan Lomba Empat Pilar dapat dibaca sebagai konsekuensi tidak langsung dari kurang optimalnya advokasi perencanaan anggaran berbasis data dampak.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki keselarasan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Sama halnya dengan temuan Hartanti dan Sunarso (2024), Bakesbangpol TTS juga menghadapi tantangan rendahnya partisipasi kelompok sasaran. Namun berbeda dengan konteks Yogyakarta yang lebih urban, hambatan di TTS lebih kompleks karena faktor geografis—ada sekolah di kecamatan terpencil yang belum pernah mendapat kunjungan dalam tiga tahun terakhir. Temuan ini memperkuat penelitian Putra (2023) yang menemukan dimensi regulator belum optimal, namun memperluas penelitian tersebut dengan menunjukkan ketidakoptimalan di TTS lebih disebabkan oleh hambatan anggaran dan geografis. Berbeda dengan penelitian Idrus dan Lukito (2024) di Jakarta Utara yang menemukan tata kelola sudah relatif baik, kondisi TTS menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan yang lebih mendasar. Temuan yang paling menarik dan belum pernah dikaji sebelumnya adalah efektivitas integrasi nilai budaya lokal TTS—tenun ikat,

bonet adat, dan tradisi gotong royong—sebagai medium pembinaan wawasan kebangsaan yang mengubah Pancasila dari konsep abstrak menjadi bagian hidup dari identitas keseharian pelajar.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat tiga aspek penghambat utama yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada terbatasnya frekuensi, jangkauan, dan inovasi program—Lomba Empat Pilar terhenti sejak 2022 akibat Inpres efisiensi anggaran. Kedua, keterbatasan SDM aparatur: dengan wilayah kerja mencakup 32 kecamatan dan 92 sekolah, hanya ada dua orang yang mampu menjadi pemateri utama. Ketiga, rendahnya partisipasi sekolah yang dipengaruhi faktor geografis (sekolah terpencil tidak terjangkau dan tidak mampu menanggung biaya penyelenggaraan), kultural (menurunnya minat generasi muda akibat globalisasi dan media sosial), serta kurangnya diseminasi informasi. I9 dari SMAN 1 Kecamatan Mollo Utara bahkan tidak mengetahui keberadaan Bakesbangpol sebelum diwawancarai—hambatan partisipasi bukan pada minat, tetapi pada informasi yang tidak sampai. Temuan menarik lain adalah bahwa program Paskibraka memiliki dampak transformatif paling dalam namun menjangkau pelajar paling sedikit, sementara pemanfaatan media sosial yang diusulkan pelajar justru belum diimplementasikan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah berjalan namun belum optimal. Dari dimensi harapan, arah peran Bakesbangpol sudah diakui semua pihak, namun terdapat kesenjangan antara harapan dan kapasitas pelaksanaan aktual. Dari dimensi norma, kepatuhan terhadap regulasi sudah kuat, tetapi SOP tertulis belum tersusun dan konsistensi program belum merata. Dari dimensi wujud perilaku, Bakesbangpol telah melaksanakan tiga program utama yang mendapat respons positif, namun baru menjangkau 20 dari 92 sekolah. Dari dimensi evaluasi, sistem evaluasi masih bersifat informal tanpa instrumen terstruktur. Disarankan agar Bakesbangpol segera menyusun SOP tertulis, membangun sistem evaluasi berbasis instrumen terukur (pre-test/post-test), merevitalisasi Lomba Empat Pilar berbasis budaya lokal, dan merambah platform media sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten TTS perlu meningkatkan alokasi anggaran, menambah formasi pegawai Bakesbangpol, dan menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh sekolah mengintegrasikan kegiatan Bakesbangpol secara terjadwal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pengumpulan data yang terbatas (Januari–April 2026) dan tidak seluruh kecamatan terpencil dapat dikunjungi karena kendala aksesibilitas geografis.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Research). Peneliti menyarankan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik tingkat pemahaman wawasan kebangsaan pelajar sebelum dan sesudah intervensi program Bakesbangpol. Penelitian komparatif antara sekolah perkotaan dan sekolah terpencil di TTS juga relevan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin,

waktu, dan kemudahan akses selama pelaksanaan penelitian. Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Dr. Andi Azikin, M.Si selaku dosen pembimbing atas bimbingan, masukan, dan arahan selama penyusunan skripsi. Terima kasih kepada seluruh informan—kepala sekolah, guru PKn, dan pelajar di SMAN 1 SoE, SMKN 2 SoE, dan SMAN 1 Kecamatan Mollo Utara—yang telah bersedia meluangkan waktu. Penelitian ini juga tidak terlepas dari dukungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah menyediakan wahana akademik bagi peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik.* Rineka Cipta.

Koentjaningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Ed. revisi). Rineka Cipta.

Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Ed. revisi). Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru).* Rineka Cipta.

Ryaas, R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan.* Yarsif Watampone.

Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif.* Penerbit Pustaka Ramadhan.

Sarwono, S. W. (2014). *Teori-teori psikologi sosial.* PT Rajagrafindo Persada.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan teoritik-legalistik-empirik-inovatif.* Alfabeta.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar* (Ed. revisi). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Rev. ed.). Alfabeta.

Suyanto, B. (2009). *Masalah sosial anak dan remaja.* Kencana.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan.* Grasindo.

Arkan, N. F., & Ulfatun Najicha, F. (2025). Membangun kembali rasa nasionalisme di generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 12*(1), 18–27. https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.53117

Dewi, A., Azizah, S., Nurpadilah, & Supriyono. (2024). Rendahnya minat pada budaya lokal di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan, 8,* 23642–23649. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15479

Fahrurrozhi, M., Supriatna, N., & Herlina, H. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam internalisasi nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6*(1), 78–93.

Hartanti, E., & Sunarso, S. (2024). Pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. *AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 13*(1). https://journal.student.uny.ac.id/agora/article/view/22112

Idrus, I., & Lukito, M. D. (2024). Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terhadap generasi pemuda di Sungai Bambu. *Ahsana: Jurnal Penelitian*

dan Pengabdian kepada Masyarakat, *2*(1), 1–7. https://doi.org/10.59395/ahsana.v2i1.333

Maksudi, E. I. (2023). Wawasan kebangsaan prasyarat terjaganya persatuan-kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI. *Jurnal Nasional Filsafat Teologi*, 38–48.

Mellinda Fatimah, M., Abdulkarim, A., & Iswandi, D. (2020). Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan peserta didik melalui literasi digital dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Civicus*, *20*(1), 31–39. https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/16327

Natty, P. E. (2024). *Pusat inovasi kebudayaan Timor Tengah Selatan di Kota Soe dengan penerapan arsitektur tematik* [Skripsi/Karya Ilmiah]. Universitas Nusa Cendana.

Nirwana, D. C., Muhammadiah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *3*(1), 01. https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.449

Nurfatimah, S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan di kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(1), 1917–1923https://doi.org/10.31004/jptam.v5i1.1181

Pamungkas, R. S. (2021). *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan* [Skripsi, Universitas Islam Lamongan].

Putra, F. A. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam internalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *JURNAL GOVERNANSI*, *9*(1), 56–70. http://eprints.ipdn.ac.id/12864/

Renata, A., Erowati, D., & Retno, N. H. (2024). Peran pemerintah dalam upaya pemasaran produk UMKM melalui Galeri Salapak di Kota Bandung. *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(4), 79–99.

Rumengan, J. M., Kaawoan, J. E., & Sumampow, I. (2022). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Governance*, *2*(1), 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/40124

Sumolang, M. (2013). Peranan internet terhadap generasi muda di desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat. *Jurnal TEKNOIF*, *3*(2), 19.

Vikri, A., & Djohan, D. (2025). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan wawasan kebangsaan pada generasi muda di Kota Jambi* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Timor Tengah Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPR Republik Indonesia.